

Analisis Tata Kelola Pemerintah Desa Sambongrejo Terhadap Pengelolaan Geosite Watu Gandul Kecamatan Gondang Bojonegoro

Ichwan Hadi Saputra¹
Chandra Bagus Triparwana*²

¹Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Bojonegoro, Indonesia

²Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Bojonegoro, Indonesia

*email: ichwanhs@gmail.com¹, candra890triparwana@gmail.com²

(Naskah masuk : 11 Agustus 2025, Revisi : 9 Desember 2025, Publikasi : 11 Maret 2026)

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tata kelola Pemerintah Desa Sambongrejo terhadap pengelolaan potensi wisata Geosite Watu Gandul di Kecamatan Gondang, Bojonegoro, yang saat ini terbengkalai. Permasalahan utama bersumber dari kurangnya responsivitas berbagai pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utamanya adalah kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah dan Desa, yang berdampak pada infrastruktur yang tidak layak, serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang potensi geosite, diperparah dengan bubarnya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Hambatan eksternal turut memperburuk kondisi, seperti penutupan wisata saat Pandemi Covid-19 dan kendala finansial untuk mengelola lahan seluas hampir 12 hektar yang merupakan milik Perhutani. Akibatnya, minat wisatawan menurun karena akses yang sulit dan daya tarik geosite yang dianggap kurang menarik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui observasi dan wawancara mendalam, dengan data diolah menggunakan aplikasi NVivo12 Pro.

Kata kunci: Pelestarian Warisan Geologi, Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan Lokal

Abstract

This study analyzes the governance of the Sambongrejo Village Government concerning the management of the Watu Gandul Geosite tourism potential in Gondang District, Bojonegoro, which is currently neglected. The main problems stem from the lack of responsiveness from various parties. The research results indicate that the primary causes are lack of attention from the Regional and Village Governments, resulting in inadequate infrastructure, and lack of community knowledge and awareness regarding the geosite's potential, exacerbated by the disbandment of the Tourism Awareness Group (Pokdarwis). External obstacles also worsened the situation, such as the closure of tourism during the Covid-19 Pandemic and financial constraints in managing the nearly 12 hectares of land owned by Perhutani. Consequently, tourist interest has decreased due to difficult access and the geosite's perceived lack of attractiveness. The method used is descriptive qualitative through observation and in-depth interviews, with data processed using the NVivo12 Pro application.

Keywords: Geological Heritage Preservation, Community Participation, Local Empowerment

1. Pendahuluan

Sekelompok individu yang memiliki otoritas tertentu untuk menjalankan kekuasaan, dalam konteks ini, melaksanakan wewenang yang sah serta melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui tindakan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (Indonesia, 2014a) tentang Administrasi Pemerintahan, fungsi pemerintahan mencakup pelaksanaan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Indonesia, 2014b) tentang Desa, dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa dijalankan oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat

desa sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan di tingkat desa. Dalam konteks kehidupan bernegara, pemerintahan memiliki peran penting dalam mengatur masyarakat, melindungi kepentingan rakyat, serta memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini disebabkan oleh sifat dasar negara yang cenderung memaksa, memiliki monopoli, dan mencakup kedua aspek tersebut. (Sugiman, 2018)

Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikelola dan diawasi dengan lebih efektif. Setiap daerah memiliki pemerintahan dan perangkatnya sendiri, mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran pemerintah desa. Desa memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dipimpin oleh seorang kepala desa. Desa dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara sekelompok manusia dengan lingkungan mereka. Interaksi ini menghasilkan suatu bentuk atau tampilan di permukaan bumi yang dipengaruhi oleh berbagai unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi, serta hubungannya dengan daerah lain. (Sugiman, 2018)

Masyarakat memiliki dua karakteristik utama, yaitu yang bersifat terbuka dan yang bersifat tertutup. Masyarakat yang terbuka cenderung menerima perubahan yang terjadi di lingkungan mereka dan mampu mengintegrasikan berbagai jenis kebudayaan yang ada. Sebaliknya, masyarakat yang bersifat tertutup biasanya sulit untuk menerima perubahan karena mereka tidak terbiasa dengan hal-hal yang tidak mereka pahami atau jalankan. Hal ini sering terjadi pada masyarakat yang masih mempertahankan tradisi dan tinggal di daerah pedesaan. (Tedi et al., 2020) Daya tarik merupakan produk utama dari suatu destinasi yang dapat menarik minat wisatawan yang berkunjung (Madjid & Shazwani, 2019). Menurut (John D. Smith, 2012) daya tarik suatu destinasi mencerminkan perasaan dan pendapat pengunjung mengenai kemampuan destinasi dalam memenuhi kebutuhannya. Faktor daya tarik merupakan kekuatan pendorong dan merupakan alasan utama bagi wisatawan untuk memutuskan melakukan perjalanan menurut (Gramatnikovski, 2015)

Kepariwisata pada dasarnya berlandaskan pada keunikan, kekhasan, kelokalan, dan keaslian, sehingga menjadikan keanekaragaman sebagai elemen yang fundamental dan esensial. Oleh karena itu, pengembangan sektor pariwisata seharusnya bertujuan untuk melestarikan dan memperkuat identitas bangsa serta menjaga lingkungan alam. Pembangunan pariwisata di Indonesia perlu dijaga dan dipelihara agar aset masyarakat lokal terlindungi dan lingkungan hidup tetap terjaga. Masyarakat berperan aktif dalam kegiatan pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri, dan pariwisata itu sendiri merupakan manifestasi dari sistem ekonomi kerakyatan, karena melibatkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. (Jaya & Ariana, 2009).

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas pariwisata di suatu kawasan dapat memberikan dampak terhadap lingkungan dalam tingkat tertentu. Daerah yang memiliki objek wisata menawarkan keuntungan besar untuk mendukung perekonomian lokal. Oleh karena itu, diperlukan regulasi hukum untuk melindungi dan melestarikan objek wisata dari tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Peran hukum ini tercantum dalam (Pemerintah Pusat Indonesia, 2009) UU Kepariwisata, pasal 27 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata. Ayat (2) menjelaskan bahwa merusak fisik daya tarik wisata mencakup tindakan seperti mengubah warna, bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemari lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata, yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau

hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik dari daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Dalam konteks ini, baik Pemerintah maupun masyarakat harus berperan aktif dalam melindungi dan melestarikan objek wisata yang ada. Kondisi yang indah akan menarik minat wisatawan dan memberikan nilai jual bagi negara, terutama dalam konteks pariwisata internasional. (Jaya & Ariana, 2009)

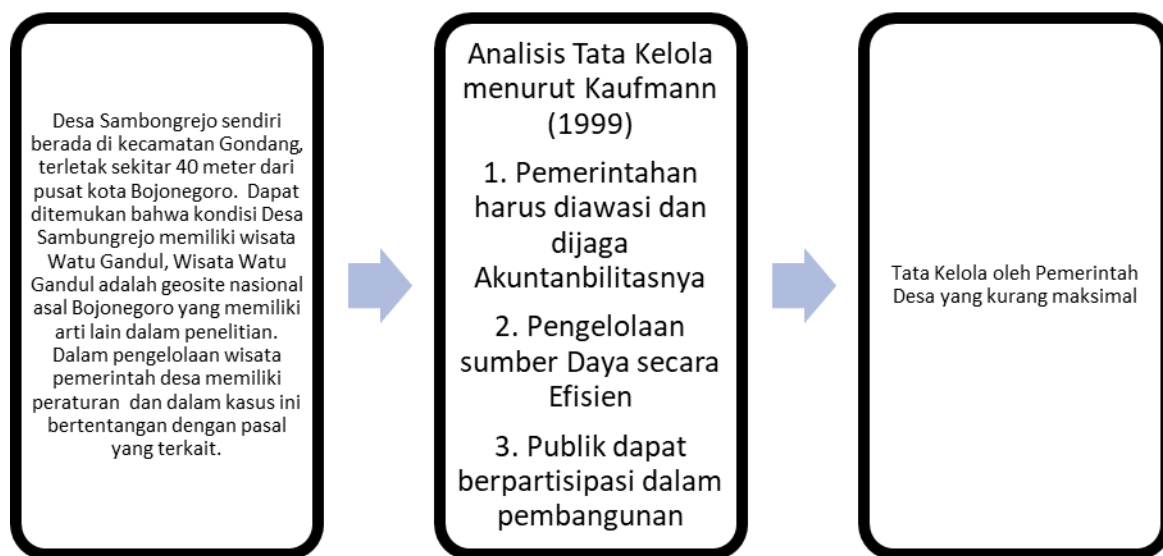
Setiap anggota masyarakat di suatu desa memiliki potensi yang dapat berkontribusi pada kemajuan desa tersebut. Namun, potensi yang dimiliki oleh setiap individu sering kali tidak teridentifikasi atau tidak terlihat. Hal yang sama juga berlaku untuk potensi yang ada di dalam desa. Seringkali, seorang individu tidak menyadari potensi yang ada dalam dirinya maupun di lingkungan tempat ia bekerja atau tinggal. (Amaru et al., 2019) Potensi wisata Watu Gandul merupakan salah satu terpenting dengan pengelolaan yang baik bagi Masyarakat atau pemerintah desa menjadikan penambahan pendapatan desa dan para peneliti apabila perawatan atau pengelolaan yang baik. Geopark sendiri diatur dalam Undang - Undang tentang Geopark di Indonesia merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark). Peraturan ini mengatur tentang pengembangan Geopark, termasuk penetapan status, perencanaan, pengelolaan, dan pelestarian warisan geologi di dalamnya.

2. Metode

Desa Sambongrejo sendiri berada di kecamatan Gondang, terletak sekitar 40 meter dari pusat kota Bojonegoro. Secara geografis Desa Sambongrejo memiliki potensi yang bagus di bidang pertanian, perkebunan, dan objek wisata. Desa yang memiliki luas wilayah 312 Ha dengan jumlah penduduk sekitar 5.075 jiwa. Dapat ditemukan bahwa kondisi Desa Sambongrejo memiliki wisata Watu Gandul, namun saat ini akibat kondisi yang kurang terawat, objek wisata tersebut terlihat terbengkalai dan masih membutuhkan pembangunan dari segi infrastruktur dan cagar budaya. Kondisi topografi yang berbatu dan berbukit Watu Gandul memiliki keunikan geologi yang menarik, dengan formasi batu yang unik dan menarik. Serta suhu antara 26 derajat hingga 30 derajat Celsius hingga perkebunan jagung dan cabai menjadi pemandangan sekitar Watu Gandul. Wisata Watu Gandul menawarkan pemandangan alam yang spektakuler dengan tebing-tebing batu yang unik dan hijaunya pepohonan. Potensi pengembangan yang besar, sehingga dapat menjadi destinasi wisata yang lebih populer di masa depan.

Wisata Watu Gandul adalah geosite nasional asal Bojonegoro yang memiliki arti lain dalam penelitian. Geosites adalah “objek geologi atau fragmen dari lingkungan geologi yang terpapar di permukaan tanah, sehingga dapat diakses untuk kunjungan dan studi” (Ruban, 2010, hlm. 326). Mereka menyediakan informasi yang berguna untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata atau rekreasi, dan dengan demikian, mereka memiliki nilai warisan. (Knigh, 2011) Meskipun banyak objek geologi yang terpapar merupakan geosites potensial, evaluasi nilai warisan mereka diperlukan untuk menetapkan sebagai geosites yang sebenarnya. Ini juga akan membantu dalam meranking nilai relatif mereka. (Bruno et al., 2014) Pengelolaan geosite di Indonesia sendiri diatur dalam undang-undang yang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark). Dalam pengelolaan wisata pemerintah desa memiliki peraturan dan dalam kasus ini bertentangan dengan pasal yang terkait. (Pemerintah Pusat Indonesia, 2019)

Tatakelola (governance) didefinisikan sebagai suatu bentuk atau proses penyelenggaraan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola problem yang dihadapi oleh masyarakat atau bangsa dengan melibatkan semua sektor antara lain: sektor publik, sektor privat (swasta), dan sektor ketiga yaitu civil society.(Asaduzzaman, 2020) Menurut (Kaufmann et al., 1999) tatakelola (governance) bersangkutpaut dengan tiga perspektif, yaitu: (i) proses dengan mana pemerintah suatu pemerintahan dipilih, diselenggarakan, dijaga akuntabilitasnya, diawasi, dan diganti; (ii) kapasitas pemerintah untuk mengelola sumberdaya secara efisien, merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan serta regulasi; dan (iii) ruang publik untuk dapat mengakses pelayanan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dilakukan oleh kelompok tujuh KKNTK Unigoro kepada warga desa Sambongrejo untuk memberi pemahaman tentang Geosite Watu Gandul. Metode kualitatif menurut (CRESWELL, 2015) merupakan metode penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah social atau kemausiaan. Sedangkan menurut (Prof. Dr. Sugiyono, 2015) metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan, memberi gambaran umum terhadap objek yang diteliti dan memudahkan analisis secara induktif terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul. Sebelumnya peneliti melaksanakan observasi sebagai pendekatan yang murni karena melibatkan pengamatan langsung tanpa harus merubah atau mengintervensi kondisi yang ada, sehingga data yang dihasilkan lebih alami.

Namun, observasi juga memiliki kekurangan, seperti memakan waktu yang cukup lama dan adanya potensi bias dari pengamat. (Siti Romdona, n.d.) Hal ini di lakukan agar mengetahui bagaimana jauh pemerintah desa mengelola objek wisata watu gandul di desa tersebut. Lokasi yang dilakukan adalah balai desa Sambongrejo Gondang yang dipastikan pengelola wisata dalam kepengurusan desa. Snowball sampling adalah salah satu metode pengambilan sampel yang paling populer dalam penelitian kualitatif, yang ditandai dengan karakteristik jaringan dan rujukan. Para peneliti biasanya memulai

dengan sejumlah kecil kontak awal (benih), yang memenuhi kriteria penelitian dan diundang untuk menjadi peserta dalam penelitian tersebut. (Nurdiani, n.d.)

Peserta yang setuju kemudian diminta untuk merekomendasikan kontak lain yang memenuhi kriteria penelitian dan yang mungkin juga bersedia menjadi peserta, yang kemudian pada gilirannya merekomendasikan peserta potensial lainnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, para peneliti menggunakan jaringan sosial mereka untuk membangun tautan awal, dengan momentum pengambilan sampel yang berkembang dari sini, menangkap rantai peserta yang semakin meningkat. Pengambilan sampel biasanya berakhir setelah mencapai ukuran sampel target atau titik saturasi. (Parker et al., 2020)

Sempel yang pertama kali yang diteliti merupakan perangkat desa sambongrejo yang memiliki akses dan pemahaman mendalam terkait urusan administrasi desa, khususnya dalam pengelolaan situs wisata Geosite Watu Gandul. Selanjutnya, karena data yang diperoleh dirasa belum cukup komprehensif, penelitian ini mengumpulkan informasi tambahan dengan melakukan wawancara mendalam kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Watu Gandul. Kelompok ini terdiri dari warga setempat yang aktif terlibat dalam pengembangan dan promosi destinasi wisata tersebut. Sebagai pelengkap, penelitian juga melibatkan para pemuda Desa Sambongrejo yang tergabung sebagai anggota pengelola Wisata Watu Gandul. Peran mereka sangat krusial karena selaku pelaku langsung dalam operasional keseharian wisata, mereka memiliki pengetahuan praktis dan pengalaman lapangan yang memperkaya temuan penelitian.

Hasil pernyataan wawancara oleh para sempel kemudian dikumpulkan dan diolah melalui aplikasi Nvivo12 Pro. NVivo merupakan sebuah aplikasi yang dibuat khusus untuk melakukan analisis terhadap data kualitatif. (Rohmadi, 2024). Melalui NVivo, peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif bisa melakukan pengkodean analitis pada data dengan cara yang cepat dan tepat sasaran. Kode itu sendiri adalah kata atau frasa pendek yang secara simbolis memberikan ringkasan yang menonjol, menarik perhatian, dan menangkap esensi dari data berbasis teks atau visual (Endah et al., 2020).

Penelitian sebelumnya mengenai pengembangan potensi desa wisata terdapat di Kabupaten Ngawi yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi yang ada, baik dari segi alam maupun budaya, yang dimiliki oleh setiap desa wisata di daerah tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan permasalahan serta faktor-faktor yang menjadi kelemahan dalam pengembangan desa wisata, serta menyusun strategi pengembangan berdasarkan potensi dan tantangan yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata perlu direncanakan dengan baik untuk menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan pedesaan. Hal ini merupakan upaya untuk mengoptimalkan fungsi dan intensitas penggunaan lahan di daerah pedesaan sebagai tujuan wisata, serta meningkatkan efektivitas dan hasil dari pelayanan yang diberikan di desa wisata. Selain itu, penelitian ini mengarahkan pengembangan desa wisata agar lebih terfokus, sehingga pembangunan fisik dan non-fisik dalam konteks pengembangan desa wisata dapat berjalan secara harmonis dan seimbang. Salah satu arah pengembangan desa wisata adalah mengoptimalkan fungsi kawasan pedesaan sebagai area wisata. (Teknik et al., n.d.)

3. Hasil dan Pembahasan

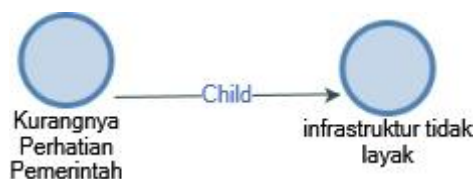
Saat melakukan observasi diketahui sekitaran Geosite Watu gandul dalam kondisi yang tidak terawat terlihat banyak semak belukar dan tanah halaman keliling sekitar geosite yang dipenuhi oleh tanaman cabai dan jagung milik perkebunan warga sekitar. Kemudian dalam wawancara yang dilakukan pertama kali dilakukan kepada perangkat desa tidak mendapatkan hasil yang cukup memuaskan bagi peneliti, mereka tidak memiliki banyak data tentang geosite Watu Gandul. Kemudian perangkat desa melemparkan pertanyaan penelitian kepada kelompok sadar wisata (Pokdarwis) desa Sambongrejo yang sebelumnya telah membuat wisata Watu Gandul dikenal luas oleh masyarakat bersama dengan Dinas Pariwisata dan para pemuda desa Sambongrejo.



Gambar 2. wordcloud yang muncul saat data diolah pada aplikasi NVIVO12 Pro

Dalam visualisasi gambar diatas bahwa tata kelola Geosite Watu Gandul di desa Sambongrejo kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro masih belum dikelola dengan baik oleh Pemerintah desa maupun masyarakat. Semua sampel yang ditemui kemudian penjelasan mereka direkam dan data di olah melalui aplikasi Nvivo12 Pro dan diketahui bahwa kurangnya perhatian pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat menjadi alasan utama permasalahan dalam pengelolaan geosite watu gandul tersebut.

3.1. Kurangnya perhatian Pemerintah Daerah maupun Desa



Gambar 3. Pengkodean data Perhatian Pemerintah menggunakan NVivo12 Pro

Dalam visualisasi gambar diatas dapat dijelaskan bahwa sebelum ditinggalkan seperti sekarang Geosite Watu Gandul pernah dikelola oleh pemuda desa serta pemerintah daerah yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bojonegoro. Namun seiring berjalannya waktu dan terbatasnya infrastuktur serta kurang adanya inisiatif dari pemuda desa sehingga wisata watu gandul semakin hari semakin sepi diakibatkan kurang adanya pengelolaan wisata sehingga terbengkalai sampai sekarang.

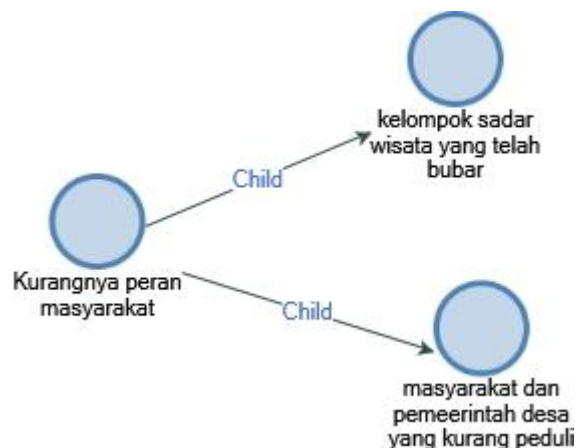
3.2. Ketidakpengetahuan tentang geosite Watu Gandul



Gambar 4. Pengkodingan data Pengetahuan Geosite menggunakan NVivo12 Pro

Dalam visualisasi pengkodingan data bahwa sosialisasi tentang Geosite sangat diperlukan. Seperti di dalam pedesaan kurangnya pengetahuan wawasan tentang potensi di desanya sendiri terutama di desa Sambongrejo Gondang. Sosialisasi diperlukan oleh dinas Pariwisata Kabupaten Bojonegoro mengingat rata-rata para mantan anggota kelompok sadar wisata desa Sambongrejo terhadap geosite Watu Gandul adalah seorang Petani, Guru pengajar, dan beberapa kelompok pemuda masyarakat. Dengan pengetahuan yang dimiliki diharapkan mereka dapat memiliki minat Kembali dalam mengelola Kembali wisata Watu Gandul di desa Sambongrejo kecamatan Gondang.

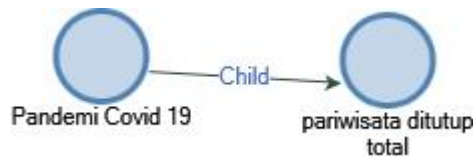
3.3. Kurangnya peran masyarakat



Gambar 5. Pengkodingan data Peran Masyarakat menggunakan NVivo12 Pro

Visualisasi di atas menggambarkan setelah keluarnya ketua kelompok sadar wisata dipindah tugaskan karena pekerjaannya para Pokdarwis Watu Gandul tidak di pedulikan lagi oleh para anggotanya yang menyebabkan geosite tersebut Sekarang tidak terawat. Seperti yang diucapkan oleh pak Yudi sebagai ketua Pokdarwis *"Dan mengelola suatu destinasi wisata itu tidak cukup dengan uang.. tapi kepedulian dari warga, pemuda juga lapisan pemerintahan terkait."* Sebelum seperti Sekarang Kelompok Sadar Wisata Watu Gandul serta para pemuda desa bekerja sama dengan Dinas Pariwisata yang sangat mendukung baik dari segi dana maupun infrastruktur.

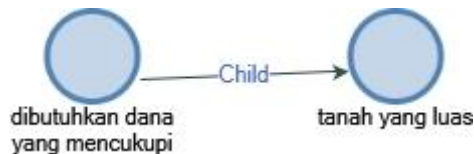
3.4. Adanya Pandemi Covid 19



Gambar 6. Pengkodingan data Pandemi menggunakan NVivo12 Pro

Gambar tersebut memvisualisasikan setelah diketahui sebelumnya bahwa wisata geosite Bojonegoro telah dikelola oleh Pokdarwis desa dan Pemerintah Daerah namun saat terjadinya pandemi virus covid 19 segala macam pariwisata di Sambongrejo ditutup total yang mengakibatkan berhentinya pengelolaan berlanjut. Seperti yang dikatakan oleh bapak Yarob wakil kepala desa *"Sebenarnya telah dilakukan wisata watu gandul di buka dua tahun kemudian terjadi pandemi covid yang mengakibatkan ditutupnya semua wisata di sini ada buton goa landak dan watu gandul"*. Pengelolaan sebuah wisata membutuhkan tata Kelola yang berkelanjutan artinya apabila terjadi masalah dalam wisata tersebut diharapkan pengelola dapat merawat objek wisatanya.

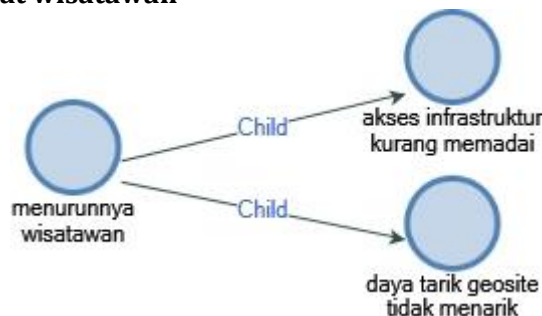
3.5. Dibutuhkan dana yang mencukupi



Gambar 7. Pengkodingan data Kebutuhan Dana menggunakan NVivo12 Pro

Dalam mengelola sebuah wisata sangat membutuhkan adanya dana terlebih lagi apabila Kawasan wisata tersebut cukup luas. Tanah wisata geosite Watu Gandul sendiri merupakan milik Perhutani yang menjadi kepemilikan resmi milik negara dengan luas hamper 12 Hektar. Dengan Tanah seluas itu dibutuhkan dana yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi oleh dana Desa.

3.6. Menurunnya minat wisatawan



Gambar 8. Pengkodingan data menurunnya wisatawan menggunakan NVivo12 Pro

Akibat akses menuju geosite yang sulit dijangkau mengurangi minat wisatawan dan Infrastruktur transportasi yang kurang memadai membuat perjalanan menjadi tidak nyaman. daya tarik geosite tidak cukup menarik atau tidak ada inovasi baru, wisatawan mungkin akan mencari alternatif lain serta Kurangnya promosi dan informasi mengenai keunikan geosite dapat mengurangi ketertarikan.

4. Kesimpulan

Pengelolaan Geosite Watu Gandul di Desa Sambongrejo, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, belum dikelola dengan baik dan saat ini terbengkalai, yang disebabkan oleh kurangnya responsivitas dari berbagai pihak. Permasalahan utama mencakup kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah dan Desa, yang mengakibatkan infrastruktur menjadi tidak layak; kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang potensi geosite, terutama setelah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) bubar, padahal pengelolaan membutuhkan kepedulian dari warga dan pemerintah; serta hambatan eksternal berupa penutupan wisata saat Pandemi Covid-19 dan kendala finansial untuk mengelola lahan seluas hampir 12 hektar milik Perhutani. Akibatnya, minat wisatawan menurun karena akses yang sulit, infrastruktur yang kurang memadai, dan daya tarik geosite yang dianggap tidak menarik. Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan pemasangan papan informasi dan sosialisasi kepada perangkat desa dan warga oleh KKNTK Universitas Bojonegoro dan Dinas terkait untuk menanamkan kesadaran dan pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaru, K., Asdak, C., & Balia, R. (2019). Penyuluhan pengenalan peta dan identifikasi potensi daerah untuk pembuatan peta potensi desa di Desa Jati Mekar dan Desa Cijati, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 2(1), 32–40.
- Asaduzzaman, A. (2020). *Partnership and Capacity Building of Local Governance*. 1–20.
- Bruno, D. E., Crowley, B. E., Gutak, J. M., Moroni, A., Nazarenko, O. V., Oheim, K. B., Ruban, D. A., Tiess, G., & Zorina, S. O. (2014). Paleogeography as geological heritage: Developing geosite classification. *Earth-Science Reviews*, 138, 300–312. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2014.06.005>
- CRESWELL, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (S. Z. Qudsy (ed.); Third Edit). Pustaka Pelajar.
- Endah, P. T., Wilujeng, S. A., Rifka, F., Achmad, S., & Imbalan, Z. (2020). Pemanfaatan Nvivo Dalam Penelitian Kualitatif. *Pemanfaatan NVIVO Dalam Penelitian Kualitatif*, 1–125.
- Gramatnikovski, S. (2015). *The Quality of The Tourist Desstinations a Key Factor for Increasing Their Attractiveness*. 6(2), 341–353.
- Indonesia, P. R. (2014a). *Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014* (Issue 1). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>
- Indonesia, P. R. (2014b). *Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014* (Issue 1). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Jaya, I. W. P., & Ariana, I. G. P. (2009). *Kepariwisata Dalam Perlindungan Dan Pelestarian*. 2009(3), 1–5.
- John D. Smith, F. W. (2012). *Cambridge IGCSE Travel and Tourism*. Cambridge University Press. <https://books.google.co.id/books?id=NKEaBQAAQBAJ>
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Zoido-lobatón, P. (1999). Governance Matters October 1999. *World Bank Policy Research Working Paper*, August, 1–61. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=188568
- Knigh, J. (2011). Evaluating geological heritage: correspondence on Ruban, D.A. 'Quantification of geodiversity and its loss.' *Proceedings of the Geologists' Association*, 122(3), 508–510. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pgeola.2010.12.008>
- Madjid, K., & Shazwani, A. C. (2019). *Pengoptimalan Jalur Pejalan Kaki di Kota Palembang Optimizing the Pedestrian Walkwayin Palembang City (Case study : from Ampera Station to*

the Ampera Tourism Area).

- Nurdiani, N. (n.d.). *TEKNIK SAMPLING SNOWBALL DALAM PENELITIAN LAPANGAN*. 5(9), 1110–1118.
- Parker, C., Scott, S., & Geddes, A. (2020). SAGE Research Methods Foundations. *SAGE Research Methods Foundations*, 2019, 0–2. <https://doi.org/10.4135/Official>
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2009). *Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009*. tentang Pariwisata.
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2019). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark). *Pemerintah Pusat Indonesia*, 1–23.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Rohmadi. (2024). *Analisis SWOT Perkembangan Dana Haji di Indonesia: Studi Pendekatan NVivo dan Literatur Review*. 97–114.
- Siti Romdona. (n.d.). TEKNIK PENGUMPULAN DATA: OBSERVASI, WAWANCARA DAN KUISONER. *JURNAL ILMU SOSIAL EKONOMI DAN POLITIK*, 3(1), 39–47.
- Sugiman. (2018). Pemerintah Desa. *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 7(1), 82–95. <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desabc9190f0.pdf>
- Tedi, K. W., Sulindawati, N. L. G. E., & Yasa, I. N. P. (2020). PENGARUH AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA, KEBIJAKAN DESA DAN KELEMBAGAAN DESA ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA WISATA (Studi Empiris pada Desa-Desa di Kecamatan Banjar). *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 9(1), 18. <https://doi.org/10.23887/vjra.v9i1.24660>
- Teknik, F., Maret, U. S., Masyarakat, K., & Maret, U. S. (n.d.). *PENGEMBANGAN POTENSI DESA WISATA DI KABUPATEN NGAWI Rara Sugiarti 1 , Istijabatul Aliyah 2 , Galing Yudana 2*.